

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan mengelola sumberdaya berupa bahan baku, tenaga kerja dan peralatan pabrik. Perusahaan tersebut menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat. Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu dengan mengoptimalkan laba. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, dapat mengsejahterakan tenaga kerja, serta kesejahteraan lingkungan.

Ketika perusahaan beroperasi sering kali menghasilkan dampak kepada lingkungan alam sekitarnya, contohnya polusi udara, polusi suara, dan limbah produksinya. Di Indonesia, peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Resolusi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dimana perusahaan lingkungan hidup tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan perusahaan lingkungan itu bisa disebabkan oleh limbah yang berbahaya yang disebut dengan limbah B3.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 74 mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatannya usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Akan tetapi,

masih ada perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan, seperti kasus direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) menjadi tersangka baru dalam pencemaran lingkungan Bengkalis, dimana dalam pelaporan tersebut perusahaan tersebut melakukan pembuangan limbah secara langsung, pengolahan IPAL yang tidak sesuai dengan UKL/UPL, dan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3 (cnn Indonesia, 2022).

Pada tahun 2016 pada kegiatan Sasana Debat Mahasiswa bertema “*Socio Economic Enviromental Accounting*” di Universitas Negeri Malang, Malang. Ketua Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Komda Malang dan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widyama Malang, Anna Sopanah menyatakan:

“Perusahaan tidak dituntut hanya mengejar keuntungan profit saja, tetapi berorientasi pada konsep *triple bottom line*, yaitu *3P (People, Planet, and Profit)*. Maka dari itu perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta turut menjaga lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No 40 Tahun 2007”.

Perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dalam bidang akuntansi keuangan yaitu dengan menggunakan akuntansi lingkungan. Anna Sopanah mengatakan **“akuntansi lingkungan adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah”**. Biaya lingkungan merupakan salah satu beberapa tipe biaya yang dikorbankan seperti halnya perusahaan memberikan barang dan jasa kepada konsumen (pelanggannya). Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran udara,

pencemaran suara dan efek sosial lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam pengalokasian anggaran yang direncanakan untuk suatu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan di mulai dari tahap identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Identifikasi adalah tahap pertama kali dilakukan, pertama kali perusahaan akan mengidentifikasi dalam menentukan biaya untuk pengelolaan kegiatan operasional. Contohnya pabrik kelapa sawit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat dan cair. Selanjutnya tahap pengakuan, apabila perusahaan sudah mengidentifikasi maka selanjutnya diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat menerima masa manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Selanjutnya tahap pengukuran, pengukuran adalah penentuan biaya angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menentukan makna dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Selanjutnya tahap penyajian, penyajian merupakan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif, apakah laporan dipisahkan dari laporan utama, atau digabungkan atau dilaporkan dalam bentuk

catatan kaki. Tahap terakhir adalah tahap pengungkapan, pengungkapan berarti tidak menutupi atau tidak disembunyikan.

Akuntansi lingkungan pada saat ini semakin menarik perhatian untuk diteliti, apalagi pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan limbah yang berbahaya. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus atau standar akuntansi khusus untuk akuntansi lingkungan, artinya pelaporan informasi lingkungan masih bersifat sukarela, tetapi dengan dampak positif akuntansi lingkungan tersebut perusahaan dapat menyajikan dengan ketentuan PSAK No. 1 Tahun 2015 paragraf 14 (empat belas) yang menyatakan: “Entitas dapat menyetujui laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah secara terpisah dari laporan keuangan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan merupakan memiliki peranan penting dan menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” Faktor-faktor lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi industri. Dan pada PSAK No. 57 dijelaskan bahwa suatu entitas mempunyai aturan yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab atau kewajiban entitas terhadap lingkungan sekitarnya yang disebut dengan provisi.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Aftika Diani (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi (*Green Accounting*) dalam pengelolaan Limbah pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir” sudah mengeluarkan biaya untuk lingkungan tetapi PT. Perkebunan tersebut belum ada menerapkan laporan

keuangan lingkungan tersendiri. Biaya yang dikeluarkan dimasukkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan tidak dapat mengetahui dimana biaya pengelolaan limbah dimasukkan. Dalam penelitian Indri Vina Poricha Nasution (2019) “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi” sudah mengeluarkan biaya lingkungan, namun belum sesuai dengan PSAK No.1 paragraf 14, perusahaan masih menggabungkan biaya lingkungan kedalam biaya pengelolaan. Dalam penelitian Estri Mei Sari (2018) “Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung” sudah baik dalam perlakuan akuntansi biaya lingkungan hanya saja biaya lingkungan bergabung dengan biaya administrasi dan umum lainnya. Dalam penelitian Muhammad Idrus (2019) “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada PTPN XIV Pabrik Gula Bone Arasoe Kabupaten Bone” elemen yang terkait dengan pengelolaan lingkungan belum tersaji secara eksplisit didalam laporan keuangannya sebab elemen tersebut masih tergabung dengan elemen lainnya yang dianggap satu kategori. Sedangkan dalam penelitian Riris M.B Pasaribu (2019) “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengelohan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi” sudah mengeluarkan biaya lingkungan, dimana biaya tersebut diakui sebagai biaya administrasi di laporan laba rugi.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mengadopsi akuntansi lingkungan. Dengan menerapkan akuntansi lingkungan perusahaan akan mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk mengelola

limbah yang dihasilkan dengan mengaplikasikan sistem akuntansi dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar serta dapat membuat laporan biaya lingkungan suatu arahan manajemen dalam pengambilan keputusan.

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa dan karet. Pabrik kelapa sawit Rambutan merupakan salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara III yang dibangun 1983. PKS Rambutan memiliki kapasitas olah 30 ton per jam dengan luas areal 7,5 Ha, PKS Rambutan mengolah kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit (CPO). Dalam pengolahan minyak sawit tentu akan menghasilkan limbah. Pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa cangkang dan serabut kelapa sawit sedangkan limbah cair berupa *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* dan Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Atas hal tersebut, PTPN berkomitmen untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah dan air akibat dari pembuangan limbah. Berkaitan dengan pengelolaan limbah dan polusi, PTPN menggunakan standar ISO 14001 “Sistem Manajemen Lingkungan”, yang diturunkan menjadi prosedur perusahaan.

Ditahun 2018 perusahaan ada menerapkan rekening netral, yang artinya adanya biaya-biaya yang dikhususkan. Dimana biaya untuk pengelolaan limbah dimasukkan kedalam biaya pengendalian lingkungan. Biaya pengendalian lingkungan di tahun 2018 terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan mesin-mesin perlengkapan, biaya listrik dan air,

pengukuran analisa, pembuangan limbah/sampah dan biaya lain-lain dengan nomor perkiraan 422.10. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah pada tahun 2018 adalah Rp. 784.154.046. Sejak di tahun 2019 perusahaan menggunakan SAP Perusahaan dimana ada perubahan mengenai biaya lingkungan. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan pada tahun 2019 adalah Rp. 177.041.400, ditahun 2020 Rp. 41.100.014, dan ditahun 2021 biaya yang dikeluarkan PKS Rambutan untuk pengelolaan limbah adalah Rp.43.204.477. Untuk itu tahun pengamatan dilakukan adalah tahun 2021. Berikut tabel 1.1 biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Kebun Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tahun 2021.

**Tabel 1.1 Biaya-Biaya Yang Dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara III
PKS Rambutan Untuk Pengelolaan Limbah Tahun 2021**

No	Biaya Yang Dikeluarkan	Jumlah (Rp)
1	Biaya konsumsi kebutuhan operasional	1.918.400
2	Biaya Jasa Profesional	11.162.565
3	Biaya Sertifikasi	16.096.875
4	Biaya Borongan	1.505.637
5	Biaya Analisa	12.521.000
Total		43.204.477

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Kebun Rambutan

Biaya konsumsi kebutuhan operasional di tahun 2021 adalah spanduk ISO, biaya Jasa Profesional (Konsultan) contohnya biaya untuk uji udara, biaya sertifikasi untuk keperluan limbah contohnya seperti biaya retribusi racun api PKS Rambutan, biaya borongan pada tahun 2021 dimaksud adalah biaya limbah B3 PRBTN, sedangkan untuk biaya analisa adalah biaya yang dikeluarkan untuk

menganalisa air limbah yang dihasilkan PKS Rambutan. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan mengelola limbahnya sendiri. Untuk alokasi biaya pengelolaan limbah, diambil dari anggaran tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Dari informasi di atas PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara telah mengeluarkan biaya lingkungan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi dengan mengangkat judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dari segi tahapannya dalam pengelolaan limbah, pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada periode 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah dari segi tahap-tahapnya pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada periode 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat tersebut berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademis dalam rangka mengkaji dan mengembangkannya. Bagi peneliti, dan orang-orang yang berminat untuk mengkaji Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan serta memberikan manfaat dalam hal penerapan secara teori akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi peneliti yaitu agar penelitian ini menambah pengetahuan Peneliti mengenai akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah pada praktik nyata diperusahaan.
2. Bagi Perusahaan yang Diteliti, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yang diteliti sebagai bahan masukan mengenai perlakuan akuntansi biaya pengolahan limbah pabriknya, dan pentingnya biaya pengelolaan limbah.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Pengetian Akuntansi Lingkungan

Akuntansi merupakan suatu bidang ilmu yang berperan penting didalam suatu kegiatan perusahaan, kerana akuntansi dapat membantu setiap kegiatan administrasi perusahaan agar dapat menghasilkan informasi yang diperlukan baik itu pihak internal maupun eksternal. Akuntansi dalam penerapannya merupakan suatu prosedur untuk mencatat , mengklasifikasi, serta melaporkan dalam bentuk laporan keuangan tentang segala transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dan pada akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut dengan baik agar dapat mengetahui apa yang akan terjadi.

Menurut *American Institute of certified public accountants (AICPA)*

“akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan suatu mata uang dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya diinterpretasikan hasil transaksi dan peristiwa keuangan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.”

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi (IAI, 2017) menyatakan bahwa **“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dalam membuat keputusan ekonomi.”**

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengiktisaran transaksi sehingga dapat

memberikan informasi laporan mengenai kondisi keuangan. Akuntansi berguna menyediakan suatu informasi yang berguna bagi kegiatan-kegiatan manajemen, pemegang saham, pemerintah dan pihak lain yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut.

CSR adalah suatu kegiatan-kegiatan sosial yang mana dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap masyarakat luas dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta interaksinya dengan pemangku kepentingan secara sukarela. Lingkungan adalah suatu kesatuan dari aktivitas produksi dari suatu perusahaan yang mana tentunya di dalam proses produksi tersebut mengakibatkan polusi yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkungan (lingkungan hidup) adalah suatu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesahjeteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ikhsan (2009:14) menyatakan bahwa

“Akuntansi lingkungan didefenisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut.”

Sedangkan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) dalam Ikhsan (2009:15) menyatakan:

“Akuntansi Lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Menurut Cohen & Robbins (2011) dalam buku *green accounting: akuntansi dan lingkungan* menyatakan, **“Akuntansi lingkungan adalah jenis akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktifitas ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsenkuensi kesehatan dari perencanaan serta keputusan bisnis”.**

Menurut Anna Sopanah dalam artikel Muchammas (2016), **“Akuntansi lingkungan adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkan biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah”.**

Menurut Lako (2018) dalam bukunya *Akuntansi Hijau* menjelaskan sebagai berikut:

“Akuntansi hijau adalah suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi”.

Aniela dalam jurnalnya (2012) menyatakan, **“Akuntansi hijau merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan”**.

Menurut Sari et al (2022) dalam jurnal Husni Muhammad dkk, menyatakan: **“Akuntansi biaya lingkungan yang berarti informasi yang dimasukkan ke praktik akuntansi perusahaan terkait manfaat dan biaya lingkungan untuk menghindari biaya perbaikan”**.

Sedangkan Astuti (2012) dalam jurnalnya menyatakan, **“Akuntansi hijau adalah bagaimana memasukan konsekuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan”**.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan adalah Akuntansi lingkungan adalah hasil perkembangan dari akuntansi sosial pada bidang ilmu akuntansi dimana ada 5 tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dimana biaya-biaya tersebut adalah biaya lingkungan, biaya lingkungan dikeluarkan oleh perusahaan berguna untuk menjaga, mengurangi, bahkan menghindari dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.1.1 Pengertian Limbah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lainnya pada pasal 17 dikatakan:

- a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
- b. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Menurut Ikhsan (2009:222) menyatakan:

“Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis”.

Maka dari itu limbah adalah suatu sisa produksi dimana hasil produksi tersebut bisa mencemari lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis.

2.1.2 Jenis Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dari sisi pengguna dibedakan menjadi tiga jenis (Fasua, 2011) dalam jurnal Kusumaningtias (2013) adalah:

1. Laba Akuntansi Nasional

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada sumber daya alam, menyajikan statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, yang terbarukan maupun tidak terbarukan.

2. Akuntansi Keuangan

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Akuntansi Manajemen

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan.

2.2 Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Defenisi biaya lingkungan mencakup dari seluruh biaya-biaya paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidakpastian.

Menurut Ardin Doloksaribu (2020:240) mendefenisikan **“Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kualitas lingkungan”**. Hansen dan Mowen menyatakan bahwa **“Biaya lingkungan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak, atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dimasa depan”**.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya langkah yang diambil untuk mengatur lingkungan sekitar perusahaan beroperasi dalam cara pertanggungjawaban lingkungan.
2. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal berhubungan dengan biaya kerusakan lingkungan dan perlindungannya.

3. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktivitas) untuk mencegah atau mengurangi bahan sisa dan polusi.

Menurut Ardin Doloksaribu (2020:224) lalu mengklasifikasikan biaya lingkungan sebagai berikut:

1. Biaya perlindungan lingkungan (*environmental prevention costs*) merupakan biaya untuk mencegah timbulnya limbah dan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Contoh dari aktivitas pencegahan antara lain evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemeliharaan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau mengapis limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikat ISO 14001.
2. Biaya deteksi lingkungan (*enviromental detection costs*) merupakan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya kegagalan lingkungan (*enviromental internal failure cost*) yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang lingkungan luar. Contoh: pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan

polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.

4. Biaya kegagalan non lingkungan (*enviromental external failure costs*) merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu: biaya kegagalan yang direalisasi (*realized external failure costs*) dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi (*unrealized external failure costs*). Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan adalah biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayarkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial ini dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dihasilkan dari degradatio lingkungan yang berhubungan dengan dampak negatif terhadap properti atau kesejahteraan individu. Dalam kedua kasus, biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan meskipun penyebab adalah perusahaan.

Berikut tabel klasifikasi biaya lingkungan berdasarkan aktifitas Hansen dan Mowen

Tabel 2.1 Klasifikasi Biaya Lingkungan Berdasarkan Aktifitas menurut Hansen dan Mowen

<p>Aktifitas Perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi dan memilih pemasok Mengevaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan polusi Melaksanakan studi lingkungan Mengaudit risiko lingkungan Mengembalikan sistem manajemen lingkungan Mendaur ulang produk Memperoleh sertifikasi ISO 14001
<p>Aktifitas Deteksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengaudit aktivitas lingkungan Memeriksa produk dan proses Mengembangkan ukuran kinerja lingkungan Menguji pencemaran Memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok Mengukur tingkat pencemaran
<p>Aktifitas Kegagalan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengoperasikan peralatan pengendali polusi Mengolah dan membuang sampah beracun Memelihara peralatan polusi Mendapatkan lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah Mendaur ulang sisi bahan
<p>Aktifitas Kegagalan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Membersihkan danau yang tercemar Membersihkan minyak tumpah Membersihkan tanah yang tercemar Menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan) Merestorasi tanah ke keadaan alamiahnya Hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk Menggunakan bahan baku dan listrik secara efisien Menerima perawatan medis karena polusi udara (S) Hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran (S) Hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi (S) Rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat (S)

Sumber: Hansen & Mowen buku Akuntansi Manajerial tahun 2017

2.3 Peraturan Yang Terkait Dengan Akuntansi Lingkungan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 membahas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU ini mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2 mengatakan “Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.” Dan pada pasal 41 mengatakan “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU ini mengatur tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dimana merupakan keharusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (pasal 1 ayat 3). Dan pada pasal 74 pasal 1 yang dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

UU ini mengatur mengenai Kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan pada halaman 7 poin 8 harus menguraikan dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum.

Dalam aturan ini aspek lingkungan merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan maka harus memperhatikan kepedulian pengelolaan lingkungan sesuai tertulis pada pasal 11 ayat 1.

2.4 Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Akuntansi Lingkungan

Menurut Ikhsan (2009 hal, 32-33) fungsi akuntansi lingkungan dibagi menjadi 2 yang fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Internal

Internal adalah fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri, dimana pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa. Adapun pemeran utama dan faktor yang paling berpengaruh pada fungsi internal adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan maupun kebijakan internal perusahaan. Sebagai halnya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan untuk mengatur biaya konversi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan

akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

2. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konversi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Fungsi eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi yang diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi lingkungan tersebut akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban serta transparansi bagi stakeholders.

Menurut Ikhsan (2009, halaman 21;24) maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan adalah

- 1. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat komunikasi manajemen lingkungan.**
- 2. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konversi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konversi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga bisa digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konversi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.**
- 3. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat.**
- 4. Akuntansi lingkungan digunakan sebagai menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konversi lingkungan dan hasilnya pada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan berbagai pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.**

Menurut Ikhsan (2009) akuntansi tidak hanya menyediakan data biaya yang penting untuk menilai dampak kegiatan keuangan manajemen, tetapi juga

arus informasi fisik (penggunaan bahan baku dan daftar biaya pengiriman barang-barang) bantuan menandai dampak lingkungan. Contoh dari beberapa biaya yang terkait dengan lingkungan dan manfaatnya bagi akuntansi manajemen lingkungan meliputi:

1. Pencegahan polusi
2. Desain untuk lingkungan
3. Penilaian dasar hidup lingkungan atau pembiayaan atau desain
4. Jaringan manajemen lingkungan
5. Pembelian dengan syarat lingkungan
6. Memperluas produk yang dihasilkan atau tanggung jawab produk
7. Sistem manajemen lingkungan
8. Evaluasi kinerja lingkungan dan tolak ukur
9. Pelaporan kinerja lingkungan

2.5 Tahapan Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Tahap perlakuan alokasi biaya lingkungan ada lima tahapan, mulai dari identifikasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Berikut penjelasannya:

2.5.1 Identifikasi Biaya

Menurut Ikhsan (2009) akuntansi manajemen memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengukur penghematan biaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Sehingga manajemen mempunyai informasi untuk mengontrol dan mengendalikan biaya lingkungan demi tercapainya produk yang efisien dan murah.

Pertama kali perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulan eksternalitas yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai contoh misalkan pabrik kelapa sawit diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga perlunya ada penanganan khusus untuk mengidentifikasi limbah yang akan ditimbulkan antara lain: limbah padat, limbah cair. Sehingga manajemen mempunyai informasi untuk mengontrol dan mengendalikan biaya lingkungan demi tercapainya produk yang efisien dan murah. Menurut Susenohaji dalam modul akuntansi lingkungan (2014) menyebutkan biaya lingkungan sebagai berikut:

Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan

Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan

Biaya pembelian bahan bukan hasil produksi

Biaya pengolahan untuk produk

Penghematan biaya lingkungan

Setiap biaya-biaya lingkungan yang ada, diklasifikasikan oleh perusahaan secara berbeda. Jadi setiap perusahaan masih memiliki pandangan berbeda dari penentuan biaya akuntansi lingkungan. Hal ini dikarenakan akan lebih memudahkan manajemen untuk lebih fokus dalam menentukan keputusan.

Akuntansi lingkungan saat ini belum memiliki standar akuntansinya sendiri. Pertama kali perusahaan hendak mengidentifikasi elemen yang terkait dengan akuntansi lingkungan. Dimana elemen tersebut adalah aset dan beban, aset digunakan sebagai wadah penampungan limbah dan beban yang dikeluarkan

dalam perlakuan akuntansi. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) pengertian aset adalah sumber daya yang dikuasi oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Dan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) pengertian beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya nilai aset yang tidak menyangkut pembagian dividen kepada penanaman modal.

2.5.2 Pengakuan Biaya

Elemen-elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening atau biaya pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Menurut Anne dalam Artikel *Greening Accounting* mengemukakan pandangannya bahwa pengalokasian pembiayaan untuk biaya pengelolaan lingkungan dialokasikan pada awal periode akuntansi untuk digunakan selama satu periode akuntansi tersebut. Sedangkan menurut Fika (2016) **“Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (*kos*) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan”**. Jadi pengakuan berkaitan dengan waktu atau kapan suatu transaksi dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca ataupun laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus

diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:

- a. Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sedangkan pengakuan beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Begitu pun dengan pengakuan aset dan beban terkait dengan akuntansi lingkungan.

2.5.3 Pengukuran Biaya

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu obyek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat transaksi terjadi yang dimana dicatat dalam penyusunan laporan keuangan. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah nilai yang tepat sesuai kebutuhan rill perusahaan setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang

bersangkutan masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran yang berbeda-beda karena dalam SAK dan teori-teori masih belum ada yang mengatur khusus tentang pengukuran biaya lingkungan.

Berikut berbagai dasar pengukuran adalah sebagai berikut:

- a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- b. Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang lama setara aset diperoleh sekarang.
- c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan norma (*orderly disposal*).
- d. Nilai sekarang (*present value*). Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.
- e. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau menyelesaikan suatu liabilitas, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.5.4 Penyajian Biaya

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan, agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Penyajian juga berkaitan dengan bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan laporan keuangan, apakah terpisah atau tergabung dalam laporan

keuangan. Penyajian mengenai akuntansi lingkungan dalam PSAK No. 1 2015

Tahun paragraf 14 yang menyatakan:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.”

Perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Model komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan secara garis besar dapat dikategorikan dalam empat macam model, antara lain:

a. Model Normatif

Model ini berawal dari premis bahwa perusahaan akan membayar segalanya. Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam satu ruang lingkup rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya.

b. Model Hijau

Model hijau menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih. Selama suatu perusahaan menggunakan sumber daya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar konsumsi atas biaya sumber daya. Proses tersebut memaksa perusahaan menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya meskipun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan

kemudian melaporkan biaya tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan induk untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaan.

c. Model Intensif Lingkungan

Model pelaporan ini mengharuskan adanya pelaksanaan kapitalisasi atas biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi dengan sehingga dalam laporan keuangan selain pembiayaan yang diungkapkan secara terpisah, juga memuat mengenai catatan-catatan aktiva tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.

d. Model Aset Nasional

Model aset nasional mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan terhadap akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. Dalam model ini dapat ditekankan bahwa selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional yang dipandang sebagai tanggung jawab secara nasional. Variasi alternatif model dalam perbedaan materi yang diungkap antara perusahaan satu dengan perusahaan yang menganut model lainnya lebih banyak disebabkan oleh faktor tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan

masing-masing operasional usaha. Perusahaan dapat memilih alternatif model varian dalam menentukan sikap dan bentuk tanggungjawab sosialnya sesuai dengan proporsional masing masing, namun secara substansial bahwa pertanggungjawaban lingkungan tetap menjadi pertimbangan utama setiap perusahaan.

2.5.5 Pengungkapan Biaya

Pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Menurut Ikhsan (2009) apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan diartikan sebagai memberikan data yang bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tidak tercapai. Pengungkapan membahas mengenai pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan, atau lebih spesifik lagi. Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela. Menurut PSAK No. 1 paragraf 117 Tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan dalam Estri (2018), bahwa:

“ Entitas dapat meungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan lebih memahami laporan keuangan.”

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal yang bersifat informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai, selain apa yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Pengungkapan biaya pengolahan limbah secara sederhana dapat diartikan sebagai keluarnya setiap informasi mengenai perusahaan yang memiliki arti tidak menutupi atau

menyembunyikan laporan tersebut. Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan-laporan akuntansi lingkungan.

Menurut Arfan Ikhsan (2009) dimensi dalam pengungkapan data akuntansi lingkungan dalam hal ini meliputi:

1. Proses dan kegiatan konversi lingkungan.
2. Item-item yang membentuk dasar akuntansi lingkungan.
3. Hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan.

2.6 Format Penerapan Akuntansi Lingkungan

Berikut tabel 2.2 Format penyajian hasil akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2009 Hal. 145) yaitu :

**Tabel 2.2 Format Penyajian Akuntansi Lingkungan
Biaya Kegiatan Konservasi Lingkungan
“Kategori berhubungan dengan kegiatan bisnis”**

Kategori		Kunci kegiatan dan hasil	Investasi	Biaya
1. Biaya Area Bisnis				
Uraian	1.1 Biaya pencegahan polusi			
	1.2 Konservasi lingkungan global			
	1.3 Biaya sirkulasi sumber daya			
2. Biaya upstream/downstream				
3. Biaya administrasi				
4. Biaya R&D				
5. Biaya kegiatan social				
6. Biaya penyelamatan lingkungan				
Total				

Sumber: Ministry of the Environment Japan, 2005. *Environmental Accounting Guidelin*

Kemudian salah satu contoh kasus laporan penyajian akuntansi lingkungan dalam jurnal Nursanabila (2019) adalah pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Laporan Biaya Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2018

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Laporan Biaya Lingkungan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018		
	Biaya Lingkungan	Persentase dari Biaya Operasional
Biaya Risk Quality Management:		
-	Rp 0	0 %
Total Biaya Risk Quality Management	Rp 0	0 %
Biaya Maintenance:		
Pembersihan Jalan dan Pertamanan	Rp 62.904.406	0,20 %
Total Biaya Maintenance	Rp 62.904.406	0,20 %
Biaya Community Development Program:		
Pelestarian Alam	Rp 1.548.260.000	4,99 %
Total Biaya Community Development Program	Rp 1.548.260.000	4,99 %
TOTAL BIAYA LINGKUNGAN	Rp 1.611.164.406	5,19 %

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan 2018 dan laporan program kemitraan dan bina lingkungan 2018 PT. Jasa Marga (Persero) TBK

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.4 dapat dibuat rekapitulasi keseluruhan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu penelitian ini dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aftika Diani (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) Dalam Pengelolaan Limbah Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir	Kualitatif Deskriptif	Perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya pengelolaan limbah dengan baik, pengungkapan dibuat hanya di kantor pusat
2	Indria Vina Poricha Nasution (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan belum sesuai dengan PSAK No.1 paragraf 14 tahun 2015. Perusahaan masih menggabungkan biaya lingkungan ke dalam biaya pengolahan, seharusnya perusahaan membuat akun biaya lingkungan secara tersendiri dalam laporan laba rugi
3	Estri Mei Sari (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT.	Deskriptif Kualitatif	PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha mengakui biaya pengelolaan limbah menggunakan metode <i>accrual basis</i> , diukur dengan satuan moneter, menyajikan biaya lingkungan secara model normatif, yaitu mengakui dan

		Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung		mencatat biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu rekening secara umum bersama rekening lain dimana biaya lingkungan tersebut masih bergabung dengan biaya administrasi.
4	Muhammad Idrus (2019)	Analisis Penerepan Akuntansi Lingkungan pada PTPN XIV Pabrik Gula Bone Arasoe Kabupaten Bone	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan alokasi biaya lingkungan yang dilakukan oleh Pabrik Gula Bone Arasoe dilakukan secara langsung dengan Unit Sanitasi Lingkungan yang diakui sebagai aset tetap, elemen terkait dengan pengelolaan lingkungan belum tersaji secara eksplisit didalam laporan keuangan sebab elemen tersebut masih tergabung dengan elemen lainnya yang dianggap satu kategori, dimana biaya tersebut dikategorikan biaya umum menyajikan biaya lingkungan secara model normatif yaitu dengan manajemen menggabungkan rekening biaya-biaya yang serumpun menjadi satu pos biaya dan tidak dibuat dalam jurnal khusus tersendiri.
5	Riris M. B Pasaribu (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi	Deskriptif Kualitatif	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi mengolah limbah secara berdasarkan jenis beban administrasi dan umum di laporan laba rugi. Akan tetapi biaya pengolahan limbah yang dilekuarkan tidak merinci.

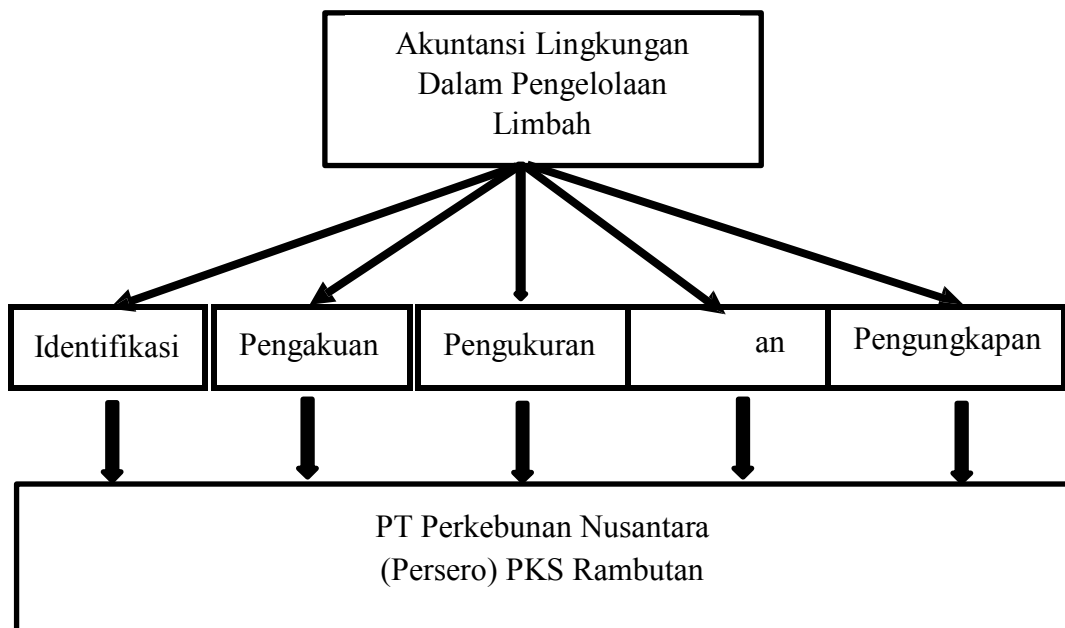
Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran seperti gambar 2.1. Penerapan akuntansi lingkungan adalah dengan memasukkan biaya-biaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan dimana dalam penelitian ini berfokus pada biaya pengelolaan limbah yang kemudian dilakukan dengan tahapan alokasi biaya mulai dari tahap pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

Tahap pengidentifikasian yaitu dimana tahap menganalisis elemen apa saja yang ada dalam pengelolaan limbah oleh PTPN III PKS Rambutan, kemudian ke tahap pengakuan merupakan menganalisis proses pembentukan suatu akun, pos maupun rekening terkait hal-hal yang sudah teridentifikasi dimana dalam hal pengakuan selain membentuk nama akun juga memilih metode apa saja yang digunakan dalam hal pengakuan tersebut yang artinya kapan suatu akun, pos maupun rekening tersebut diakui dan dicatat menurut akuntansi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengukuran, tahap pengukuran adalah proses penetapan sejumlah uang yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan limbah dan metode apa yang digunakan dalam pengukuran tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian tahap penyajian, yang merupakan bagaimana terkait akuntansi lingkungan menurut PTPN III PKS Rambutan, apakah terpisah atau tergabung dalam laporan keuangan, dimana penyajian ini akan menggambarkan terlihat atau tidaknya laporan akuntansi lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Tahap terakhir adalah tahap pengungkapan, tahap pengungkapan lingkungan tersebut

apakah PTPN III PKS Rambutan sudah mengungkapkan suatu akun, pos maupun rekening sendiri terkait akuntansi lingkungan menentukan adanya alokasi akun terkait akuntansi lingkungan di dalam laporan keuangan perusahaan. Dan juga adanya pengungkapan terkait akuntansi lingkungan di dalam catatan atas laporan keuangan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Didesain Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan yang beralamat Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Fokus penelitian ini adalah menganalisis seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah agar limbah tidak dibuang sembarangan yang dapat merusak lingkungan sekitar. Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, tempat, waktu, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan serta kesesuaian dengan standart dan teori yang terkait. Maka dari itu jenis data yang digunakan adalah data subjek yaitu opini bagian akuntansi dan bagian pengelolaan mengenai akuntansi serta data dokumen laporan mengenai biaya pengelolaan limbah.

Menurut Moleong (2018) menyebutkan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Jadongan Sijabat (2014:85) menyatakan, **“Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)”**. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan narasumber yaitu responden bagian akuntansi.

2. Data Sekunder

Munurut Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak (2012:106) menyatakan, **“Data Sekunder merupakan data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”**. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai profil perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, sturuktur organisasi perusahaan serta tugas dan fungsi setiap jabatan dalam PT. Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan dan laporan tahunan perusahaan serta biaya-biaya terkait dalam pengelolaan limbah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah:

1. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber.

Esterberg dalam (Sugiyono, 2019) menyatakan, bahwa: **“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu”**.

Adapun daftar pertanyaan terdapat pada lampiran 1.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa saja informasi yang ingin diketahui dari kepala bagian akuntansi dan pihak-pihak yang terkait sehingga daftar pertanyaan dibuat secara sistematis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa: **“Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”**.

Peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi atas data profil seperti sejarah singkat perusahaan, sturuktur organisasi perusahaan serta tugas dan fungsi

setiap jabatan dalam PT. Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan dan laporan tahunan perusahaan serta biaya-biaya terkait dalam pengelolaan limbah.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif, adapun teknik analisis yang digunakan setelah selesai pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menganalisis setiap biaya-biaya terkait akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan.
2. Melakukan tahapan pengidentifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya-biaya yang berkaitan perlakuan akuntansi akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah. Dalam tahapan ini juga melihat tahapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah oleh perusahaan dengan yang terdapat di dalam standar akuntansi yang berterima umum.
3. Melakukan pembahasan seluruh dari keseluruhan data-data yang berkaitan biaya pengelolaan limbah yang telah dikumpulkan dan dianalisis.
4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan. Kemudian setelah ditemukan hasil penelitiannya maka didapat jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.